

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Puskesmas Sikumana Kota Kupang sudah mengimplemntasi Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) namun belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Hasil evaluasi implemntasi PPK-BLUD pada Puskesmas Sikumana kota Kupang dimana persyaratan substantif, persyaratan teknis dan administratif pada Puskesmas belum berjalan secara baik.
2. Faktor penghambat dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Puskesmas Sikumana adalah Sumber Daya Manusia yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur dalam BLUD, kurangnya tenaga kerja dalam bidang akuntansi.

6.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis meberikan saran bagi Puskesmas Sikumana Kota Kupang adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Dewan Pengawas BLUD berdasarkan peraturan yang berlaku dan juga menyusun tugas dan fungsi serta kewenangan Dewan Pengawas dalam pengelolaan BLUD.

2. Pihak Puskesmas harus mengajukan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan bimbingan teknis dan juga bisa memiliki dewan pengawas untuk mendapatkan pengelolaan BLUD yang maksimal dan dapat menyusun persyaratan dalam BLUD.
3. Meningkatkan pelayanan Puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta secara periodik melakukan pengukuran capaian Standar Pelayanan Minimal untuk semua jenis layanan.
4. Pihak Puskesmas merekrut tenaga kerja yang memiliki latar belakang di bidang akuntansi agar dapat menyelesaikan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, E. S. 2016. Analisis Kesiapan Implementasi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Studi Kasus pada Puskesmas Ngesrep dan Bandarharjo).
- Alifatul Mahmudah Nuryawati 2019. Evaluasi Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Dr Soegiri Lamongan.
- Annafi Indra Tama. 2018 . Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Keuangan RSUD Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
- Gery Fajar Cahyadi 2016. Evaluasi Persyaratan Substantif, Teknis, dan Administratif Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Sebelas Puskesmas di Kabupaten Ngawi.
- Indra Bastian 2010. Akuntansi Sektor Publik, edisi tiga, Yogyakarta.
- Nurul Rahmadani Makarao. 2017. Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Katapang.
- Peraturan Pemerintah RI No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Peraturan Walikota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur No 184A/KEP/HK/2015. Tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas
- Rawung, L. C. 2016. Evaluasi Kinerja Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Studi pada Puskesmas BLUD Kota Balikpapan).
- Sunandar, Agung 2017. Evaluasi Atas Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PKBLUD) Di Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Banjarbaru kota Banjarbaru
- Sunarda, Agung 2017. Evaluasi atas Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara.

Zaiky, Muhammad. 2016. Analisis Persyaratan Substantif, Teknis, Dan Administratif Dalam Rangka Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Kanjuruhan Malang Kabupaen Malang.